

Judul : Sahkan IA-CEPA, 224 Anggota Dewan Absen
Tanggal : Jumat, 07 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

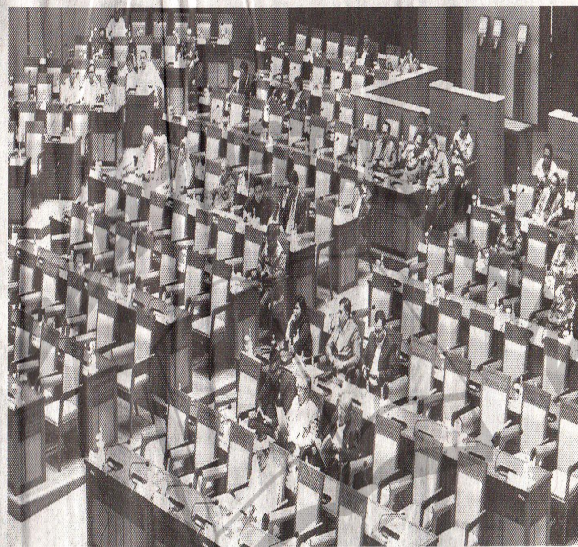
Sahkan IA-CEPA, 224 Anggota Dewan Absen

JAKARTA-DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Saat mengesahkan hal itu, sebanyak 224 anggota dewan absen. Agenda kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat ekonomi kedua negara itu pun diwarnai kursi kosong.

Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Cak Imin menyampaikan rapat paripurna dihadiri 334 dari 575 anggota dewan. Rapat dinyatakan digelar terbuka. "Berdasarkan catatan Kesetjengan DPR RI telah ditandatangani 334 anggota yang mana memenuhi, maka ketentuan forum dalam mengambil keputusan telah mencapai kuorum," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurut Cak Imin, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang telah ditandatangani pada 4 Maret 2019 itu diyakini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, industri dan sektor jasa. Selain itu, perjanjian itu juga diharapkan meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia ke Australia.



CHARLIE/INDOPOS

LENGANG - Rapat paripurna pengesahan Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Kamis (6/2/2020). IA-CEPA adalah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat ekonomi kedua negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung berharap pengesahan bisa dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan investasi dan ekspor. Ia juga berharap, dengan pengesahan tersebut, keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi rantai pasok global bisa tercapai. "Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia harus mengutamakan kepentingan nasional dan ke-

daulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan," kata Martin.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin dapat memenuhi harapan tersebut. Perjanjian tersebut diyakininya bakal ekspor bahan bakar mineral Indonesia ke Australia.

"Ekonomi mereka (Australia) kan berkaitan dengan jasa dan mineral lalu batu bara.

Nah kami lihat kuartal IV 2019 sektor mineral kan turun, tentu diharapkan ini (IA-CEPA) bisa bantu," papar Airlangga.

Ia menyatakan, perjanjian perdagangan bebas Indonesia- Australia dibuat karena selama ini neraca dagang dalam negeri dengan Negeri Kanguru tersebut masih defisit. Artinya, Indonesia lebih banyak impor dari Australia. "Ya, diharapkan tidak defisit lagi, tapi tidak bisa instan," ucapnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia sebesar US\$8,6 miliar pada 2018 lalu. Dengan prediksi pertumbuhan 17-19 persen, maka nilai perdagangan Indonesia-Australia bisa menembus US\$10-US\$10,2 miliar.

Catatan BPS pada 2018 menunjukkan produk ekspor utama Indonesia ke Australia meliputi petroleum (senilai US\$636,7 juta), kayu dan furnitur (US\$214,9 juta), panel LCD, LED, dan panel layar lainnya (US\$100,7 juta), alas kaki (US\$96,9 juta), dan ban (US\$61,7 juta).

Sementara, produk impor utama Indonesia dari Australia adalah gandum (US\$639,6 juta), batu bara (US\$632 juta), hewan hidup jenis lembu (US\$573,9 juta), gula mentah atau tebu lainnya (US\$314,7 juta), termasuk bijih besi dan bijih lainnya (US\$209,3 juta). (aen)